

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa dampak pada pergeseran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari sentralistik ke arah desentralistik, hal ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah terutama daerah kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di daerahnya dengan tetap berpedoman kepada garis kebijakan yang bersifat nasional.

Berkaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menuntut penyesuaian dan penataan dalam kelembagaan pemerintah daerah yang dilakukan secara komprehensif dengan mengakomodir tuntutan-tuntutan strategik yang ada di lingkungan daerah, sehingga menciptakan suatu hubungan yang efektif dan efisien, baik hubungan vertikal (pusat dan daerah) maupun hubungan horizontal (antar kabupaten/kota) yang pada akhirnya memberikan sinergik terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan strategik (Renstra) yang diharapkan dapat dijadikan bahan untuk penyusunan berbagai kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pemerintahan.

Mengingat Renstra Pemerintah Kota Makassar akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) unit kerja; RAPBD dan sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, maka substansi dan manfaat Renstra Pemerintah Kota Makassar dibatasi hanya pada kebijakan dan program yang akan dibiayai dari APBD Kota Makassar. Adapun, tugas, program lainnya dilaksanakan oleh Walikota melalui dukungan dana diluar APBD berdasarkan azas tugas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan, akan dipertanggungjawabkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Renstra daerah adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, oleh karena itu substansinya menjabarkan potret permasalahan pembangunan kota, serta program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan APBD dengan

mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang-bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan Kota Makassar.

1.2. Latar Belakang.

Kota Makassar mempunyai kedudukan strategis sebagai pusat pelayanan dan pengembangan di Propinsi Sulawesi Selatan bahkan sebagai pusat pelayanan bagi Kawasan Timur Indonesia. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kebesaran Makassar pada masa lalu yang tidak hanya dikenal sebagai kota besar di nusantara, tetapi juga sebagai salah satu kota besar dunia karena keterbukaan akses Makassar terhadap perdagangan internasional.

Dengan luas wilayah 175,77 km², pada tahun 2003 Makassar memiliki penduduk sebanyak 1.160.011 jiwa yang terdiri atas 572.688 laki-laki dan 587.325 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1,53% dalam tiga tahun terakhir. Penduduk Kota Makassar tersebut mempunyai latar belakang yang majemuk dilihat dari sudut pandang agama dan keyakinan serta latar belakang sosial budaya.

Hingga tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 6,33% hal ini sangat dipengaruhi oleh empat lapangan usaha yang memberikan sumbangan sekitar 80,61%. Keempat lapangan usaha tersebut adalah perdagangan, hotel dan restoran (30,11%), industri pengolahan (24,00%), Angkutan dan Komunikasi (13,32%) serta jasa-jasa (13,18%). Sedang *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) perkapita tercatat pada tahun 1999 sebesar Rp.5.097.024, dan pada tahun 2003 sebesar Rp.8.595.715, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 14,61%. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut akan menjadi salah satu ukuran untuk melihat intensitas kegiatan pembangunan Kota Makassar pada berbagai kelompok lapangan usaha.

Kebesaran Kota Makassar pada masa lalu serta potensi sosial budaya dan ekonomi yang dimiliki, saat ini dihadapkan pada perubahan yang dinamis dalam konteks globalisasi pada satu sisi, dan kecenderungan menguatnya semangat otonomi daerah pada sisi yang lain, menuntut adanya paradigma pembangunan

yang adaptatif terhadap dua kutub kecenderungan tersebut sebagai upaya untuk menempatkan Kota Makassar tetap menjadi Kota yang terkemuka.

Makassar dalam sejarahnya telah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Demikian halnya saat ini dan kecenderungan ke depan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat dunia yang tengah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat pada satu sisi, namun memberi peluang terjadinya sinergitas antar daerah pada sisi yang lain.

Bersamaan dengan globalisasi tersebut kecenderungan lain yang dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekwensi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi masing-masing daerah, interkoneksi antar daerah, dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah.

Bagi Kota Makassar, dua kecenderungan di atas dapat mendorong pengembangan dan pemanfaatan potensi kota karena memiliki potensi sumberdaya manusia, khususnya yang strategis dan ketersediaan berbagai infrastruktur kota. Namun demikian, juga dapat menciptakan beban karena dalam kenyataannya Makassar juga dihadapkan pada masalah perkotaan yang cukup kompleks. Diantara masalah tersebut yang cukup mendasar adalah; kualitas manusia yang masih relatif terbatas, potensi ekonomi yang belum berkembang secara optimal, kualitas dan ketersediaan infrastruktur kota yang masih terbatas dibandingkan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan atas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi, dan program berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis.

Rencana strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Hal ini sejalan dengan

perubahan paradigma tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan antara lain pada unsur-unsur transparansi, konsistensi, akuntabilitas, partisipasi sehingga segala tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggung-jawabkan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menekankan adanya pertanggungjawaban publik atas kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sifat RENSTRA Pemerintah Kota Makassar ini : *pertama*, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu stratejik dengan sasaran yang dinamis; *kedua*, mengikuti kecenderungan baru; *ketiga*, lebih berorientasi pada tindakan antisipatif.

1.3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan penyusunan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar adalah:

- a. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikasi program APBD Kota Makassar dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kota;
- c. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Kota Makassar.

1.4. Dasar Penyusunan RENSTRA.

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN;
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- l. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009;
- m. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Makassar;
- n. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 1999 -2004;
- o. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Makassar Tahun 2001-2005;

1.5. Alur Pikir.

Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Kota Makassar yang telah diuraikan dalam dokumen Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Hal ini sejalan dengan perkembangan dokumen perencanaan Kota Makassar yang pada satu sisi untuk sementara waktu atau akhir tahun 2004 Pola Dasar masih tetap menjadi rujukan perencanaan Pembangunan Kota Makassar, serta Propeda

menjadi rujukan perencanaan hingga tahun 2005. Pada sisi lain, dua dokumen perencanaan tersebut sebenarnya substansinya termuat dalam visi Walikota/Wakil Walikota terpilih.

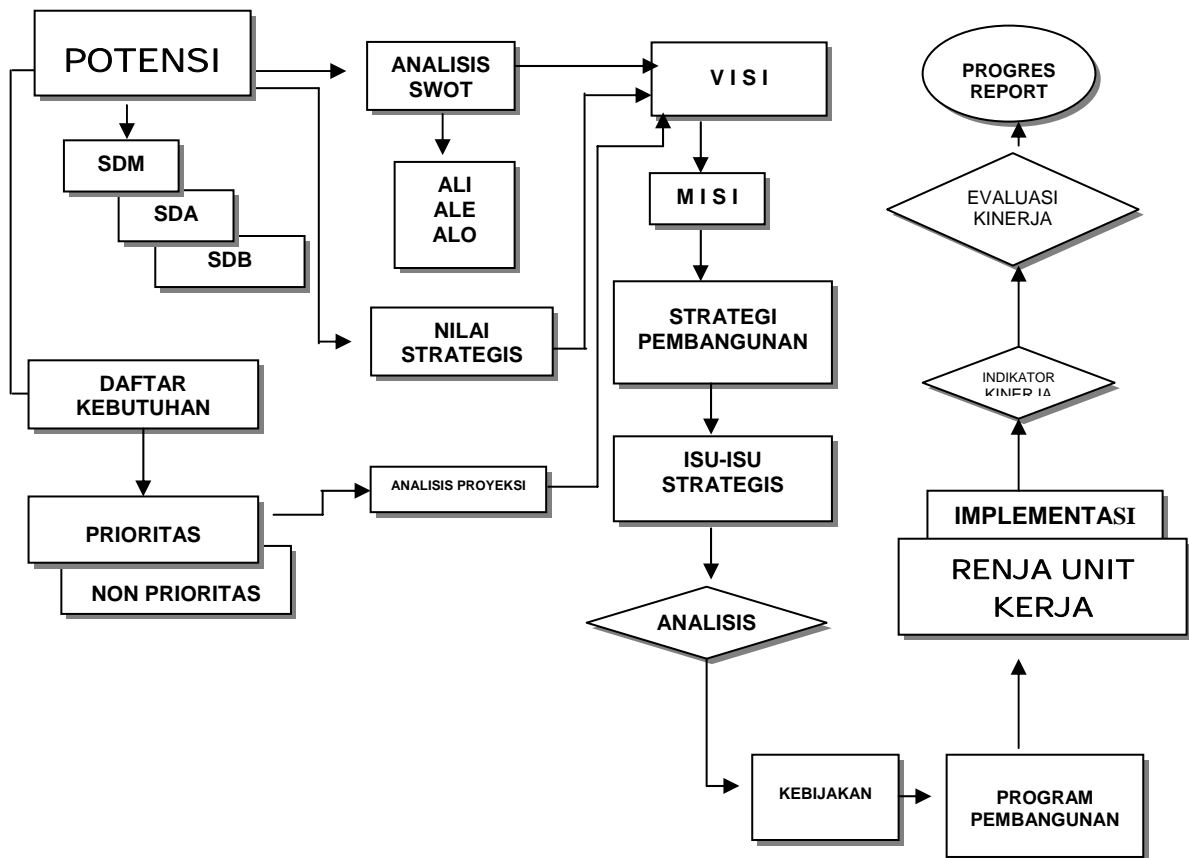
Rangkuman dari Visi Walikota/Wakil Walikota memuat uraian tentang potensi yang dianalisis secara bersamaan dengan permasalahan Kota Makassar yang melahirkan daftar kebutuhan yang bersifat prioritas dan non prioritas. Analisis potensi dan daftar kebutuhan prioritas tersebut terkristalisasi pada Visi Pemerintah Kota Makassar yang menjadi pangkal tolak Renstra Tahun 2004-2009.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi pembangunan. Dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis / Rencana Kinerja masing-masing unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kota Makassar yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam APBD Kota Makassar setiap tahunnya dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja masing-masing unit kerja, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Walikota.

Gambar : Alur pikir Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009.



Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;
- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.

1.6. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi umum, latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar penyusunan Renstra, alur pikir dan sistematika penulisan.
- Bab II : Isu-isu dan analisis lingkungan strategis yang berisi isu-isu strategis, analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan organisasi.
- Bab III : Visi, misi, nilai, strategi dan kebijakan.
- Bab IV : Kebijakan dan program.
- Bab V : Pengukuran dan evaluasi kinerja yang berisi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan bobot kebijakan dan program.
- Bab VI : Kaidah pelaksanaan yang berisi metode pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta arah pelaksanaan.

BAB II

ISU-ISU DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1. Isu-isu Strategis.

Isu-isu strategis merupakan rumusan terhadap respons kondisi obyektif yang melingkupi Kota Makassar dalam kaitannya dengan kecenderungan global, nasional dan regional.

a. **Globalisasi.**

Makassar ke depan akan turut serta dalam proses globalisasi yang ditandai dengan kompetisi yang semakin ketat. Karena itu implikasi-Implikasi dari globalisasi tersebut akan menjadi bagian dari perkembangan Makassar, karena itu isu strategis paling mendasar adalah berkaitan dengan peningkatan daya saing dan kompetensi dalam menghadapi perubahan global.

b. **Otonomi Daerah.**

Kebijakan otonomi daerah akan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan posisi Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, maka isu pokok yang berkaitan dengan otonomi daerah ini adalah menjadikan Makassar sebagai pusat pelayanan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

c. **Kemajemukan Warga Kota.**

Makassar dihuni oleh penduduk dengan berbagai latar belakang. Karakteristik Ini dapat menjadi salah satu faktor dinamisasi perkembangan kota pada satu sisi dan sekaligus menjadi faktor pemicu kerentanan sosial, politik dan lingkungan.

d. **Pengembangan Kawasan Kota.**

Makassar pada satu sisi diharapkan dapat berkembang secara pesat sebagai kota yang berwawasan lingkungan dan bersahabat, sedang pada sisi lain kota ini dihadapkan pada berbagai masalah seperti ketimpangan antar kawasan, inkonsistensi pelaksanaan tata ruang, maraknya kawasan kumuh dan potensi kelautan yang belum dikembangkan secara optimal.

e. Good Governance.

Perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini diharapkan oleh banyak pihak dapat mewujudkan *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Bagi Kota Makassar, isu pokok dalam kaitan dengan *good governance* ini adalah perlunya penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable, transparan, membuka ruang partisipasi, keadilan dan responsible.

2.2. Analisis Lingkungan Strategis Kota Makassar.

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources (Sumberdaya), Organisation (Organisasi) and Norm (Norma) disingkat "RON"* yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.

2.2.1. Analisis Lingkungan Internal.

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja pembangunan yang secara umum dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

a. Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai;
- Letak geografis wilayah yang sangat strategis dan sebagai ibukota propinsi;
- Potensi sumberdaya alam, khususnya kelautan dan perikanan yang memadai;
- Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang memadai;
- Potensi usaha perdagangan dan jasa yang memadai;
- Potensi modal transportasi yang memadai;
- Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat.

b. Kelemahan.

- Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja belum memadai;
- Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum dikelola secara optimal;
- Kebersihan dan keindahan kota belum memadai sebagai tempat hunian yang indah, bersih dan menarik ;
- Kualitas sumber daya manusia di bidang industri dan jasa masih rendah;
- Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai;
- Struktur ekonomi terutama keterkaitan antar bidang lapangan usaha masih lemah dan rentan terhadap persaingan global;
- Pelayanan publik belum maksimal;
- Daya saing produk unggulan kota yang masih lemah;
- Sistem informasi dan komunikasi yang belum memadai dalam menghadapi perdagangan bebas;
- Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya jaminan keamanan dalam berbagai kehidupan masyarakat;
- Pembinaan politik dan produk legislasi daerah serta penegakan HAM secara proporsional belum optimal;
- Kelembagaan pemerintah & masyarakat belum berkembang dengan baik;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal;
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.

2.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah dan secara umum tidak dapat dikendalikan, disatu sisi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan pada sisi lain merupakan tantangan yang harus dihadapi.

a. Peluang.

- Posisi Kota Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk pembangunan bidang kelautan dan perikanan;

- Terbukanya perdagangan bebas yang memungkinkan produk unggulan Kota Makassar mendapatkan pasar yang lebih luas;
- Adanya kerjasama antar daerah khususnya dalam kawasan Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar (MAMMINASATA) yang mendukung pengembangan daerah dan kegiatan ekonomi antar daerah;
- Komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di KTI;
- Otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan, mengelola dan meningkatkan daya saing daerah;
- Aksesibilitas Kota Makassar yang terbuka untuk interkoneksi regional, nasional dan internasional.

b. Tantangan.

- Persaingan yang tinggi di pasar global menuntut peningkatan daya saing produk;
- Kuatnya daya saing tenaga profesional yang memasuki pasar kerja Nasional dan Daerah;
- Kecenderungan global yang makin memerlukan pentingnya penerapan azas keberlanjutan dalam pembangunan;
- Sumberdaya finansial dan tenaga kerja profesional mudah mengalir ke luar daerah;
- Arus informasi global mudah mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat.

2.2.3. Analisis Lingkungan strategis Organisasi.

Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan secara umum dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Kota Makassar, baik dalam kekuatan maupun dalam kelemahan.

a. Kekuatan.

- Jumlah sumberdaya aparatur cukup memadai;
- Komitmen untuk mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan pemerintah dan masyarakat;

- Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
- Motivasi kerja sebagian aparat cukup tinggi.

b. Kelemahan.

- Kualitas aparatur yang belum professional;
- Struktur organisasi Pemerintah Kota Makassar yang belum efisien dan efektif;
- Tugas dan fungsi pada unit-unit organisasi belum terkoordinasi dan terintegrasi secara proporsional;
- Kelembagaan pemerintah yang kurang transparan, efektif, konsisten dan akuntabel;
- Sumber daya financial belum cukup memadai baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- Belum terciptanya distribusi kewenangan Pemerintah Kota ke Pemerintah Kecamatan.

c. Peluang.

- Otonomi luas memberikan kebebasan yang memungkinkan pemerintah daerah menata dan mengelola pemerintahan daerah menjadi pemerintahan yang baik (*good government*) dan dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
- Budaya politik masyarakat Kota Makassar berakar pada nilai budaya lokal, memungkinkan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan berkesinambungan;
- Terbukanya perdagangan bebas, adanya desentralisasi lebih memudahkan Pemerintah Kota Makassar memfasilitasi pelaku ekonomi dalam mengembangkan jaringan kerja (*Networking*);
- Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan daerah lainnya memungkinkan berkembangnya sinergitas pelaku ekonomi regional;
- Adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan lembaga perguruan tinggi dibidang penelitian.

d. Tantangan.

- Dinamika masyarakat Kota Makassar yang heterogen, menuntut kemampuan kepemimpinan yang proaktif, responsive dan konsisten;
- Masyarakat Kota Makassar yang maju menuntut pelayanan transparan, konsisten dan akuntabel;
- Perkembangan lingkungan strategis mengarah pada perdagangan bebas, menuntut kemampuan mekanisme pelayanan publik sesuai standar *International Standar Organisation (ISO)*.
- Dinamika kelembagaan pemerintah yang tinggi menuntut kemampuan bagi aparat dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi;
- Kebijakan pemerintah pusat yang masih sentralistik dan kurang konsisten menyulitkan pemerintah kota dalam mengelola pelayanan secara efisien dan efektif;
- Urbanisasi yang cukup tinggi.

2.3. Faktor Kunci Keberhasilan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat menunjang pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Terselenggaranya partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. Komitmen kepemimpinan yang peka, responsive, konsisten, kredible yang didukung oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar;
- c. Tersedianya sumberdaya manusia yang professional, dan senantiasa berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal;
- d. Dukungan prasarana dan sarana serta sumber pembiayaan yang memadai;
- e. Konsistensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam penerapan otonomi daerah;
- f. Terselenggaranya interkoneksi wilayah baik regional, nasional dan internasional;
- g. Berperannya semua unit organisasi Pemerintah Kota Makassar sebagai suatu tim kerja terpadu dan sinergis;
- h. Iklim yang kondusif bagi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2.4. Asumsi.

Guna mencapai kinerja Pemerintah Kota Makassar sesuai Renstra ini dapat dicapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kehendak masyarakat Kota Makassar yang berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Terwujudnya komitmen kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar yang kredible dengan dukungan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar;
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang terampil, disiplin dan peduli terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap lingkungannya;
- d. Terwujudnya prasarana dan sarana Kota, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan;
- e. Terwujudnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah secara konsisten dan berkesinambungan;
- f. Terwujudnya sikap proaktif Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sinergitas dan interkoneksi dalam lingkungan pemerintahan dan dunia usaha;
- g. Terwujudnya kejelasan tugas dan fungsi serta sikap proaktif dari seluruh unit kerja Pemerintah Kota Makassar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab;
- h. Terwujudnya keterlibatan seluruh stakeholders dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik;
- j. Terwujudnya peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dalam mendukung sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang optimal;
- k. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- l. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

VISI, MISI, NILAI STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. V i s i.

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek.

Dalam konteks itu, Kota Makassar telah menetapkan visi sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Makassar dengan rumusan :

“Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Pendidikan Budaya dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat”

Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut perlu dijabarkan dalam Visi lima tahunan Pemerintah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota, sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi Makassar sebagai Kota Maritim, sebagai simpul kegiatan Niaga dan Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2009 sebagai berikut :

“Terwujudnya Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”

Visi tersebut di atas mengandung makna :

- a. Terwujudnya kota **Maritim** yang tercermin pada tumbuh berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya ;
- b. Terwujudnya atmosfir per**Niagaan** yang aman, lancar dan mantap bagi pengusaha kecil, menengah maupun besar ;

- c. Terwujudnya atmosfer **Pendidikan** yang kondusif dalam arti adil dan merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti, dan yang relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- d. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini dilandasi oleh **Martabat** para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang **Manusiawi** dan tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

3.2. M i s i.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar tersebut di atas yang pada hakekatnya di arahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar kedepan, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut :

1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional;
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi potensi lokal;
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis kemajemukan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur;
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan;
7. Peningkatan infrastruktur Kota dan pelayanan publik.

3.3 Nilai-Nilai.

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan, sehingga pembangunan Kota Makassar memiliki daya dorong, perekat dan pengendali

pembangunan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religius berupa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai tersebut adalah :

1. Kemerdekaan.

Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas pembangunan yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan legal formal, serta kepada norma-norma kesusilaan baik menurut pandangan budaya maupun oleh tuntunan agama.

2. Kebersamaan.

Perbedaan-perbedaan yang eksistensial karena keberagaman latarbelakang warga kota, tidak lantas menjadikan Makassar sebagai ajang perseteruan dari perbedaan tersebut. Karena pada banyak simpul-simpul kehidupan, terutama sebagai warga kota terdapat persentuhan atau titik integrasi, pada wilayah mana kebersamaan hendaknya dipelihara dan ditumbuh kembangkan.

3. Saling Memanusiakan.

Nilai ini dimaksudkan untuk menghargai harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

4. Saling Menghargai.

Nilai ini dimaksudkan agar setiap orang menghormati kedudukan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan pemerintahan dan dalam pergaulan keseharian.

5. Saling Mengingat.

Sadar akan kodrat manusia yang dapat saja khilaf atau lalai dari suatu amanat, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang santun dan bermartabat.

6. Keterbukaan.

Agar proses pembangunan dapat menyertakan peran serta masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pada pengendalian pembangunan, dengan keterbukaan aspek akuntabilitas dari pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara optimal.

7. Pembangunan Berkelanjutan dan Terintegrasi.

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan dan terintegrasi, karena itu diperlukan harmonisasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang mempertemukan kebutuhan manusia untuk generasi mendatang

8. Semangat Kejuangan.

Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan seperti yang tertera pada lambang Kota Makassar yang berbunyi '**sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai**'

3.4 Strategi.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi, yaitu :

1. Pemerataan.

Dimaksudkan agar pemerataan terciptanya kualitas manusia dapat dilakukan melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, selain itu pemerataan dimaksudkan pula untuk keseimbangan pembangunan wilayah antara Makassar bagian Barat dengan wilayah Timur, Utara, Selatan dan keseimbangan pembangunan wilayah daratan dan laut serta juga untuk memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat pada berbagai bidang pembangunan.

2. Pertumbuhan.

Dimaksudkan agar dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang mencakup pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan itu yang hendak dikembangkan adalah

tumbuhnya pendapatan masyarakat seiring dengan peningkatan PAD, sehingga mendorong kesan pembebanan terhadap masyarakat atas penyelenggaraan pembangunan dapat dieleminasi melalui peningkatan pendapatan mereka.

3. Keserasian dan Keseimbangan.

Dimaksudkan agar heterogenitas masyarakat kota dapat dikembangkan secara serasi dan menjaga keseimbangan kepentingan yang dapat menjamin keharmonisan hubungan antara berbagai kelompok. Hal yang sama dimaksudkan pula di dalam pola hubungan kerja antara unit atau lembaga pemerintah yang mengedepankan keserasian dan keseimbangan tersebut.

4. Interkoneksitas.

Dimaksudkan agar dapat dikembangkan kerjasama internal kelompok/ lembaga fungsional masyarakat kota, serta kerjasama eksternal lintas daerah baik antar pemerintah maupun antar pelaku ekonomi dan antar organisasi Non Pemerintah. Hal ini dimaksudkan pula sebagai sebuah instrumen dalam membangun kultur otonomi daerah yang bertumpu pada keikutsertaan berbagai elemen masyarakat dalam membangun kota dengan berbagai bentuk kerjasama.

5. Dinamika yang Terkendali.

Dimaksudkan agar terdapat ruang yang cukup bagi tumbuh dan berkembangnya dinamika pembangunan dari dan oleh berbagai elemen masyarakat dalam kerangka hukum, budaya dan agama.

3.5 Kebijakan.

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan lima tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Pembangunan Kualitas Manusia.

Potensi sumberdaya manusia yang ada di Kota Makassar dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kualitasnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumberdaya manusia harus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan. Wujud kota idaman seperti ini, selain merupakan harapan, juga tantangan yang harus disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras. Untuk itu, pemerintah kota harus menyikapinya dengan membangun manusia berkualitas yang terdidik, sehat, sejahtera, berbudaya dan bertoleransi.

2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Keunggulan komparatif yang dimiliki Kota Makassar seperti letak geografis, potensi sumberdaya alam, dan infrastruktur sosial ekonomi, tidak akan memberikan manfaat yang berarti tanpa dibarengi dengan keunggulan kompetitif. Keberadaan kedua keunggulan ini akan menjadi pondasi utama untuk membangun ekonomi Kota Makassar yang berdaya saing tinggi. Jika kedua keunggulan Kota Makassar ini dapat dibangun, maka berbagai peluang ekonomi yang ada dapat terkelola dan berproduksi secara maksimal akan mengembalikan kejayaan Makassar tempo dulu sebagai salah satu kota niaga maritim dunia. Keunggulan kompetitif yang harus dibangun adalah laju produksi dan perdagangan komoditas unggulan yang tinggi; ketahanan ekonomi kota yang kuat, iklim usaha dan investasi yang kondusif; kesempatan kerja dan berusaha yang tinggi.

3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan.

Seperti halnya kota besar lainnya, Kota Makassar juga menghadapi masalah kebersihan dan keindahan. Untuk menjadikan Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang indah dan sehat, maka diperlukan adanya tata ruang kota yang memperpadukan ruang darat, laut dan udara secara harmonis, sehingga menjadi tempat berkreasi, belajar, berusaha dan beraktivitas lainnya yang indah, damai dan menarik (idaman) serta sehat dan tenteram.

4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pelayanan prima tidak dapat diwujudkan dengan hanya mengandalkan jumlah dan motivasi kerja aparat pemerintah saja. Pemberian layanan prima juga membutuhkan dukungan aparat yang profesional dan struktur organisasi yang efektif, dimana didalamnya terdapat pembagian tugas dan fungsi yang terkoordinasi dan terintegrasi secara proporsional. Oleh karena itu, agar dapat memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan, maka Kota Makassar mutlak mendapatkan dukungan kelembagaan pemerintahan yang baik, aparatur pemerintah yang profesional, keuangan yang memadai, dan layanan informasi publik yang berkualitas.

5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM.

Suasana kehidupan warga Kota Makassar akan selalu tentram dan damai bilamana nilai-nilai kearifan sosial, budaya dan agama senantiasa mewarnai segala aktivitas warga. Suasana tentram dan damai tersebut akan semakin tentram di dalam kehidupan warga Kota Makassar bilamana didukung oleh suasana kehidupan berpolitik yang demokratis, serta adanya sistem penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Penetapan kebijakan dan program dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis daerah dan organisasi, visi, misi dan strategi kebijakan Pemerintah Kota Makassar serta dokumen acuan perencanaan.

Kebijakan dan Program dijabarkan sesuai arah kebijakan yang mencakup; pembangunan kualitas manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan kawasan, tataruang dan lingkungan, pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan politik, penegakan hukum dan HAM.

4.1. Pembangunan Kualitas Manusia.

Untuk membangun manusia berkualitas yang terdidik, sehat, sejahtera, berbudaya dan bertoleransi diperlukan minimal lima program utama, yaitu : 1) Peningkatan kualitas pendidikan; 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama; 4) Pembinaan pemuda dan olahraga dan 5) Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pengadaan sarana dan prasaran sekolah/pendidikan; (2) Perbaikan/penyempurnaan kurikulum pendidikan; (3) Pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik; (4) Sosialisasi peran bidang pendidikan dalam pembangunan sumberdaya manusia; dan (5) Pengembangan pendidikan dan latihan kerja.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pembinaan kesehatan masyarakat; (2) Penataan lingkungan perumahan dan permukiman; (3) Penyediaan dan penyehatan air bersih; (4) Pemberantasan penyakit menular dan imunisasi; (5) Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; (6) Kampaye kesehatan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); (7) Kampanye anti narkoba, tembakau dan HIV / AIDS; (8); Pengembangan kelembagaan dan manajemen kesehatan/rumah sakit; (9) Peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit; dan (10) Peningkatan dan pengembangan SDM kesehatan/rumah sakit.

Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pengembangan dan pembinaan organisasi sosial; (2) Pemutakhiran data keluarga sejahtera dan prasejahtera; (3) Penyuluhan, bimbingan dan pengentasan masalah sosial (narkoba, anak terlantar, orang tua jompo, wanita asusila, judi, minuman keras dan lain-lain) serta daerah kumuh; (4) Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan sosial; (5) Perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; (6) Bimbingan dan penyuluhan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; (7) Bantuan bahan dan material bagi korban bencana; (8) Pelatihan satgas penanggulangan bencana; (9) Pemeliharaan pekuburan dan taman makam pahlawan; (10) Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (11) Peningkatan pemahaman/pengamalan agama dan kerukunan hidup antar umat beragama; (12) Pelestarian, pengembangan dan penghayatan nilai-nilai budaya daerah; dan (13) Pengembangan wisata budaya.

Pembinaan pemuda dan olahraga dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Bantuan kegiatan kepemudaan, (2) Pembinaan kewirausahaan bagi pemuda, dan (3) Bantuan kepada organisasi olahraga.

Peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Bimbingan dan perlindungan anak jalanan dan terlantar; (2) Bimbingan dan perlindungan lanjut usia; (3) Bimbingan dan perlindungan keluarga rawan sosial ekonomi; (4) Bimbingan dan pembinaan keluarga muda mandiri; (5) Bimbingan dan peningkatan motivasi usaha keluarga miskin; (6) Rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang cacat dan eks kusta; dan (7) Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan yang mengutamakan jender.

4.2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Untuk mengembalikan kejayaan tempo dulu Kota Makassar sebagai salah satu kota niaga maritim dunia, maka diperlukan minimal empat program utama, yaitu: 1) Peningkatan komoditi unggulan; 2) Peningkatan ketahanan ekonomi;

3) Pengembangan investasi dan regulasi usaha; dan 4) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

Peningkatan komoditi unggulan dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pengembangan usaha perikanan; (2) Pengembangan wisata pantai dan laut; dan (3) Pengembangan bursa komoditi unggulan.

Peningkatan ketahanan ekonomi dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pengembangan layanan jasa dan perdagangan; (2) Pengembangan agroindustri/agrobisnis; (3) Pengembangan ekonomi kerakyatan; dan (4) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah.

Pengembangan investasi dan regulasi usaha dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Diversifikasi bidang investasi unggulan; (2) Penciptaan iklim investari yang kondusif; (3) Perlindungan dan penggairahan usaha dan investasi; dan (4) Pengembangan informasi bisnis.

Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Perluasan kesempatan kerja; (3) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan menengah; (2) Peningkatan kualitas tenaga kerja; dan (4) Pengembangan kewirausahaan.

4.3. Pengembangan Kawasan, Tataruang dan Lingkungan.

Untuk menjadikan Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan yang indah, damai, menarik (idaman) dan sehat, maka diperlukan minimal tiga program utama, yaitu : 1) Penataan ruang; 2) Peningkatan infrastruktur kota; dan 3) Pengelolaan lingkungan hidup.

Penataan ruang dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti: (1) Penyusunan tata ruang; (2) Pengendalian tata ruang; (3) Pembuatan jaringan informasi tata ruang

Peningkatan infrastruktur kota dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Peningkatan dan pemeliharaan jalan, trotoar dan jembatan; (2) Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan pemukiman; (3) Penyiapan dokumen perencanaan teknis; (4) Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; dan (5) Penyiapan standar pelayanan minimal di bidang transportasi.

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pemanfaatan sumberdaya alam dan kota secara berkelanjutan; (2) Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (3) Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

4.4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan, maka diperlukan minimal lima program utama, yaitu : 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan; 2) Peningkatan profesionalisme aparatur; 3) Pengelolaan keuangan daerah; 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan 5) Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan; (3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan; (4) Peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan (5) Penerapan pola perencanaan partisipatif.

Peningkatan profesionalisme aparatur dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat/bintek di bidang kepegawaian; (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan melekat; (3) Pengembangan sarana dan prasarana diklat; (4) Pengembangan motivasi pegawai daerah; (5) Pengembangan kemampuan aparatur; dan (6) Peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pengelolaan keuangan daerah dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Penataan pengelolaan keuangan daerah; (2) Peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan (3) Inventarisasi potensi PAD.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Menciptakan sistem kinerja aparatur pemerintahan yang profesional; dan (2) Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan standar pelayanan publik.

Peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pengembangan sarana dan

prasarana informasi dan komunikasi; dan (2) Penyebaran informasi layanan dan hasil-hasil pembangunan daerah.

4.5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM.

Agar suasana kehidupan warga Kota Makassar selalu tentram dan damai, maka diperlukan tiga program utama, yaitu : 1) Pembinaan kehidupan politik yang demokratis; 2) Peningkatan penegakan hukum dan HAM; dan 3) Legislasi daerah.

Pembinaan kehidupan politik yang demokratis dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pemberdayaan dan penguatan lembaga politik; (2) Pengembangan budaya politik; dan (3) Inventarisasi organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan.

Peningkatan penegakan hukum dan HAM dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti : (1) Pemberdayaan lembaga dan aparat penegak hukum; (2) Peningkatan kesadaran hukum; (3) Peningkatan penegakan hukum; (4) Pemberantasan KKN; dan (5) Koordinasi sistem pengamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Legislasi daerah dapat diupayakan melalui beberapa kegiatan utama, seperti: (1) Pengembangan dan penyempurnaan materi/substansi peraturan Daerah (Perda); (2) Peningkatan peran anggota legislatif; (3) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas anggota legislatif; (4) Menerima aspirasi dari eksekutif dan masyarakat; dan (5) Sosialisasi produk perundang-undangan daerah (Perda).

BAB V

PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

5.1. Pengukuran Kinerja

5.1.1. Konsep Dasar

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan yang baik dan terencana sehingga akan bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pencapaian tersebut hanya dapat diperoleh melalui suatu evaluasi pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan di kelompokkan pada suatu parameter melalui indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, indikator keluaran, hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan untuk indikator kinerja manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Pengumpulan data kinerja di arahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektifitas.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, (2) tingkat pencapaian sasaran target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja di gunakan formulir Rencana Strategik (RS)

yang menunjukkan keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel 1. Rencana Strategi Tahun 2004-2009.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
					Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7

5.1.2. Rencana Kinerja Lima Tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran dan rencana pencapaian, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Adapun komponen rencana kinerja meliputi :

1. Sasaran.
2. Program.
3. Kegiatan.
4. Indikator kinerja kegiatan;
 - Masukan (Inputs);
 - Keluaran (Outputs);
 - Hasil (Outcomes);
 - Manfaat (Benefit);
 - Dampak (Impact):

Dokumen rencana kinerja yang telah diuraikan di atas dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Lima Tahunan (RKLT) sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja Lima Tahunan (RKLT).

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Kinerja (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Sat.	Rencana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Pengukuran pencapaian sasaran dilakukan agar dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat capaian sasaran yang direncanakan sebelumnya. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Tabel 3. Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6

(1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan Rumus :

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: right; padding-right: 20px;"> Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian </div> <div style="text-align: center;"> $= \frac{\text{Realisasi}^{*)}}{\text{Rencana}^{**)}} \times 100 \%$ </div> </div>

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**}) - (\text{Realisasi}^{*}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100 \%$$

Keterangan :

*) Kolom 3

***) Kolom 4, rencana tingkat capaian

5.1.4. Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Tabel 4. Rencana Kinerja Kegiatan.

Program	Kegiatan					Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi } ^*)}{\text{Rencana } ^{**})} \times 100 \%$$

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi } ^{**}) - (\text{Realisasi } ^*) - \text{Rencana } ^{**})}{\text{Rencana } ^{**})} \times 100 \%$$

Keterangan :

*) Kolom 6

***) Kolom 5, rencana tingkat capaian

5.2. Evaluasi Kinerja.

Evaluasi memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Untuk memudahkan di dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi secara terukur, maka ditetapkan indikator-indikator atau parameter-parameter kinerja kegiatan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga evaluator dapat lebih mudah mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta;
- Kinerja nyata dengan kinerja di daerah Kota-kota lain atau dengan standar baku yang berlaku;

5.3. Bobot kebijakan dan program.

Penyajian data dan informasi harus relevan sehingga para ***decision maker*** dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kebijakan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

▪ **Matriks Bobot Kebijakan.**

NO	KEBIJAKAN	BOBOT (%)
1.	Pembangunan Kualitas Manusia	25,00
2.	Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah	22,00
3.	Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan	20,00
4.	Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20,00
5.	Pembangunan Politik, Hukum dan HAM	13,00
	T O T A L	100,00

▪ **Matriks Bobot Kebijakan dan Program.**

NO	KEBIJAKAN / PROGRAM	BOBOT TAHUNAN					BOBOT TERHADAP	
		I	II	III	IV	V	BIJAK	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembangunan Kualitas Manusia	4,00	4,43	4,91	5,50	6,16	100,00	25,00
	1). Program peningkatan kualitas pendidikan	1,32	1,47	1,63	1,81	2,02	33,00	8,25
	2). Program peningkatan derajat kesehatan	0,84	0,93	1,03	1,14	1,31	21,00	5,25
	3). Peningkatan kesejahteraan sosial, budaya dan agama	0,64	0,71	0,79	0,88	0,98	16,00	4,00
	4). Program pembinaan pemuda dan olahraga	0,56	0,62	0,69	0,77	0,86	14,00	3,50
	5). Program peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender	0,64	0,71	0,79	0,88	0,98	16,00	4,00
2.	Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah	3,52	3,91	4,35	4,88	5,34	100,00	22,00
	1). Program peningkatan komoditi unggulan	1,20	1,33	1,48	1,66	1,83	34,10	7,50
	2). Program peningkatan ketahanan ekonomi	0,72	0,80	0,89	1,00	1,09	20,45	4,50
	3). Program pengembangan investasi dan regulasi usaha	0,88	0,98	1,09	1,22	1,33	25,00	5,50
	4). Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	0,72	0,80	0,89	1,00	1,09	20,45	4,50
3.	Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan	3,18	3,53	3,92	4,39	4,98	100,00	20,00
	1). Program penataan ruang	1,06	1,18	1,31	1,47	1,65	33,35	6,67
	2). Program peningkatan infrastruktur kota	1,38	1,53	1,70	1,90	2,16	43,35	8,67
	3). Program pengelolaan lingkungan hidup	0,74	0,82	0,91	1,02	1,17	23,30	4,66

4.	Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3,20	3,55	3,95	4,41	4,89	100,00	20,00
	1). Program peningkatan kapasitas kelembagaan	0,48	0,53	0,59	0,66	0,74	15,00	3,00
	2). Program peningkatan profesionalisme aparat	0,64	0,71	0,79	0,88	0,98	20,00	4,00
	3). Program pengelolaan keuangan daerah	0,96	1,07	1,19	1,33	1,45	30,00	6,00
	4). Program pelayanan publik	0,64	0,71	0,79	0,88	0,98	20,00	4,00
	5). Program peningkatan kualitas materi dan penyebaran informasi	0,48	0,53	0,59	0,66	0,74	15,00	3,00
5.	Pembangunan Politik, Hukum dan HAM	2,08	2,31	2,57	2,87	3,17	100,00	13,00
	1). Program pembinaan kehidupan politik yang demokratis	0,56	0,62	0,69	0,77	0,86	26,92	3,50
	2). Program Peningkatan penegakan hukum dan HAM	0,56	0,62	0,69	0,77	0,86	26,92	3,50
	3). Program legislasi daerah	0,96	1,07	1,19	1,33	1,45	46,15	6,00

Keterangan :

1. Alokasi bobot tahunan kebijakan mempunyai proporsi 100% terhadap tahun bersangkutan dan prosentase yang sama dengan bobot tersebut terhadap total bobot lima tahunan.
2. Alokasi bobot tahunan perkebijakan dalam penyusunan APBD dapat menggunakan prosentase pada matriks bobot kebijakan (prosentase konstan tahunan).

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. Metode Pelaksanaan.

6.1.1. Pola Penyelenggaraan :

- a. Pencapaian sasaran-sasaran strategi tahun 2004-2009 ditetapkan 5 (lima) kebijakan pokok dengan 20 (dua puluh) program;
- b. Sasaran Strategi RENSTRA Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian serta Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Setiap unit kerja harus menjabarkan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 ke dalam Rencana Strategis/ Rencana Kinerja (RENJA) unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. RENSTRA/RENJA unit kerja dimaksud disyahkan oleh Walikota;
- d. Upaya pencapaian sasaran Strategi RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 melalui program strategi yang penerapannya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APBD Kota Makassar;
- e. Target dan sasaran strategis pada RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 meliputi sasaran Strategi Walikota dan Wakil Walikota dan juga merupakan sasaran kerja semua unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Untuk itu, setiap unit kerja menjabarkan sasaran-sasaran strategi tersebut menjadi kegiatan strategi yang layak dan bisa diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- f. Pengukuran indikator kinerja kebijakan dan program dievaluasi berdasarkan bobot pencapaian yang tercantum dalam RENSTRA

Pemerintah Kota Makassar, sementara pencapaian pengukuran indikator kinerja kegiatan dievaluasi berdasarkan RENSTRA unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, DPRD Kota Makassar mengawasi dan mengevaluasi indikasi kinerja kegiatan mitra kerjanya, untuk menetapkan bobot capaian indikator kinerja kegiatan, program dan kebijakan tersebut;

6.1.2. Organisasi Pelaksanaan.

Efektivitas penyelenggaraan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 pelaksanaannya dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kota Makassar.

6.1.3. Sumber Pendanaan.

Sumber dana untuk menjalankan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 berasal dari sumber-sumber penerimaan APBD Pemerintah Kota yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan lain-lain yang syah serta tidak menutup kemungkinan dana partisipasi pihak ketiga sepanjang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.2. Monitoring dan Evaluasi.

- a. Monitoring dan Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009.
- b. Monitoring dan Evaluasi RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 dilaksanakan sesuai jenjang struktural organisasi Pemerintah Kota Makassar, dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan Pogram Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Makassar.
- c. Monitoring dan Evaluasi RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja pada masing-

masing unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menunjukkan seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 dilakukan dengan tertib dan objektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar tahun 2004-2009 dilaksanakan pada akhir periode, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan RENSTRA sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan RENSTRA periode berikutnya.

6.3 Arahan Pelaksanaan.

- a. RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Makassar.
- b. Setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar wajib menyesuaikan rencana strategis/rencana kerjanya dengan cara menjabarkan RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Penjabaran RENSTRA dimaksud, mencakup penetapan capaian kinerja kegiatan yang secara keseluruhan menjadi capaian kinerja RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009.
- c. Dalam kondisi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis sehingga melampaui fleksibilitas RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 (lebih/kurang dari asumsi bobot kebijakan/program) maka penyesuaiannya dituangkan di dalam Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD untuk menjadi dasar bagi unit-unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar untuk menyusun program tahunan yang tercermin pada APBD.

- d. RENSTRA Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 harus dijalankan secara bertanggungjawab, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi, dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Makassar.

WALIKOTA MAKASSAR,

Cap / ttd

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN